



Protokol Kesehatan Diperketat

JOGJA—Pemda DIY berencana menerapkan aturan pembatasan yang lebih ketat terkait dengan jumlah kunjungan dan jam operasional di suatu tempat.

Lugas Subarkah, Catur Dwi Janati & Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com

- Pemkab Bantul belum mewacanakan adanya PSBB maupun Pembatasan Sosial Berskala Mikro.
- Di Sleman, meski kasus positif Covid-19 terus melonjak, Pemkab Sleman tetap memilih mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

Kebijakan ini diambil karena jumlah penambahan pasien positif Covid-19 di DIY masih tinggi. Kendati demikian Pemda DIY belum berencana menerapkan aturan pembatasan secara tegas seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan dibandingkan PSBB, Pemda DIY mempertimbangkan opsi pembatasan yang lebih ketat terkait dengan jumlah pengunjung dan jam operasional di suatu tempat. "Pembatasan jumlah pengunjung di suatu tempat bisa menjadi masukan yang dibahas. Misal penjual makanan hanya boleh *take away*, supaya tidak terjadi kerumunan," kata Baskara Aji kepada wartawan di kompleks Kepatihan, Jogja, Senin (21/9).

Selain itu, kata Baskara Aji, langkah lain yang bakal ditempuh yang tidak disiplin protokol kesehatan jangan dilayani.

► Halaman 10

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala

Ttd

Protokol Kesehatan...

"Kalau dilayani akibatnya tempat usahanya yang ditutup," ungkapnya.

Baskara Aji mengatakan kendati sudah ada dasar hukum dan aparat penegaknya yakni Satpol PP, tidak akan mampu mengkoor seluruh aktivitas masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.

Sebab itu, ia mengimbau masyarakat untuk dengan sadar menerapkan protokol kesehatan.

"Yang terpenting adalah kesadaran diri sendiri. Kesadaran harus muncul karena ini bukan kepentingan pemerintah melainkan kepentingan bersama. Kita lihat angka 74, 70 [penambahan kasus] ini mau sampai kapan?" katanya.

Langkah serupa bakal diterapkan Pemkab Bantul. Sejauh ini Pemkab Bantul belum mewacanakan adanya PSBB maupun Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). "Sampai sekarang belum [ada kebijakan PSBB dan PSBM, tapi menunggu] nanti hasil rapat [bersama Bidang Penegakan Hukum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19]," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis.

Jumat pekan lalu, Helmi juga mengungkapkan perlunya evaluasi, termasuk evaluasi Peraturan Bupati (Perbup) No.79/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru apakah perlu dinaikkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Menurut dia Perbup itu hadir karena untuk membuat Perda butuh waktu lama dan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Kalau ada masukan dari kepolisian sebaiknya diperdakan kami akan upayakan," kata Helmi. Pria yang menjabat ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini masih butuh evaluasi dari Bidang Penegakan Hukum terlebih dahulu.

Di Sleman, meski kasus positif Covid-19 terus melonjak, Pemkab Sleman tetap memilih mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan dibandingkan melakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Sekda Sleman Harda Kiswaya

mengatakan kunci agar masyarakat tidak terpapar Covid-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. "Melaksanakan protokol kesehatan itu bagian dari ikhtiar yang harus dilakukan masyarakat untuk mengatasi penyebaran Covid-19," katanya.

Pemkab, katanya, selain menerapkan protokol kesehatan juga tetap membuka aktivitas agar ekonomi masyarakat tetap berjalan. Masyarakat, katanya, jangan salah memahami kebijakan pemerintah. "Kita tidak tahu kapan pandemi Covid-19 ini berakhir. Secara teori kesehatan, penularan terjadi kapan saja dan di mana saja. Tinggal bagaimana masyarakat menerapkan secara disiplin protokol kesehatan. Tidak bisa kalau tidak bergerak sama sekali," katanya.

Plt Kepala Satpol PP Sleman Susmiarto mengatakan pendisiplinan masyarakat terus dilakukan. Tujuannya untuk memberikan edukasi masyarakat dan pelaku usaha agar mematuhi peraturan yang ada terkait Protokol kesehatan kesehatan dalam masa Covid-19. "Hasil operasi yang kami lakukan terdapat 46 orang pelanggar protokol kesehatan. Sanksi juga kami berikan, meliputi bela negara 23 orang, olahraga delapan orang, kerja sosial satu orang dan peringatan lisan 14 orang."

Mantan Wali Kota

Mantan Wali Kota Jogja, Herry Zudianto dinyatakan positif Covid-19.

Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengaku memperoleh kabar HZ sapaan akrab Herry Zudianto positif Covid-19, pada Kamis (17/9) malam. "Sekarang lagi kami *tracing*," kata Heroe.

Namun persoalannya, tidak semua kontak erat Herry Zudianto berdomisili di Kota Jogja. Apalagi Herry Zudianto aktif dalam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY sehingga memiliki mobilitas tinggi. Heroe tidak memungkir

adanya kemungkinan Herry Zudianto terpapar karena kasus di PWM. "Mungkin juga karena bagian pengurus Muhammadiyah," saya kira ada intensitas ketemu juga, ini yang kami belum bisa memutuskan," katanya.

Heroe menambahkan kondisi fisik Herry Zudianto saat ini sehat dan masuk dalam kategori OTG. "Kondisi sehat, OTG, Ibu [Dyah Suminar, istri HZ] juga sudah di swab hasilnya negatif," ujarnya.

HZ mengaku dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala sakit. "Tidak ada keluhan apa-apa," kata HZ di *Whattaps Group* wartawan.

Bahkan, kata Wali Kota Jogja dua periode itu, dia tetap beraktivitas seperti biasa. "Pagi tadi saya masih berolahraga, dan makan sate kambing muda tetap enak," ujarnya.

Penambahan Kasus

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 64 penambahan kasus positif pada Senin. Kabupaten Sleman masih mendominasi penambahan ini sebanyak 38 kasus, sementara 37 kasus dinyatakan sembuh dan dua kasus dilaporkan meninggal. Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, menjelaskan dilihat dari riwayatnya, penambahan kasus terdiri dari *screening* karyawan kesehatan (lima kasus), periksa mandiri (sembilan kasus), *tracing* kasus positif (38 kasus), perjalanan dari luar daerah (dua kasus), dan masih dalam penelusuran (10 kasus). "Laporan ini berdasarkan pemeriksaan pada 680 sampel dari 608 orang," ujarnya.

Dua kasus meninggal yakni Kasus 1.658, laki-laki, 65, warga Bantul dengan komorbid stroke dan hipertensi; Kasus 1.994, laki-laki, 37, Bantul, dengan komorbid obesitas. Adapun kasus sembuh berdasarkan domisili meliputi Jogja (empat kasus), Bantul (11 kasus), Gunungkidul (satu kasus), dan Sleman 21 kasus. (Abdul Hamid Razak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005